

BAB V

PENUTUP

Konflik merupakan suatu fenomena yang terjadi yang disebabkan oleh kesenjangan visi atau lebih mengarah pada ketidaksesuaian antara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi. Perbedaan visi atau kepentingan ini semakin menambah rumit apabila disertai ekstremisme aktor-aktor yang terlibat di dalamnya.

Wilayah Afrika merupakan wilayah yang sering atau rawan terjadi konflik. Ada beberapa faktor yang menyebabkan ini, *pertama*, wilayah Afrika adalah daerah yang kaya akan kandungan sumber daya alam yang dapat digunakan sebagai sumber cadangan ekonomi. Hal inilah yang memicu banyak kepentingan negara-negara luar Afrika untuk untuk bekerjasama bahkan mendominasi dengan negara-negara di wilayah Afrika. *Kedua*, selain kepentingan dalam bidang ekonomi juga terdapat kepentingan politis yaitu hegemoni politik negara-negara besar untuk menguasai dan melebarkan pengaruhnya di daerah Afrika.

Sudan merupakan suatu negara yang berada di kawasan Afrika bagian timur. Negara Sudan adalah daerah terluas di wilayah Afrika. Keadaan ini tentunya juga menjadi alasan kelimpahan sumber daya ekonomi yang terkandung di dalamnya. Namun keadaannya terbalik dengan fakta yang terjadi. Negara Sudan masuk dalam kategori beberapa negara miskin di dunia.

Sejak kemerdekaannya, Sudan selalu dihadapkan pada persoalan domestik. Konflik horizontal antara masyarakat domestik Sudan sering terjadi.

Masalah marginalisasi ekonomi, politik, perang saudara, juga sering menjadi alasan pecahnya konflik di Sudan. Konflik pertama adalah konflik Sudan Utara dengan Sudan Selatan. Akar masalahnya adalah ketika pemerintah Sudan berusaha untuk menetapkan sistem hukum syariah islam. Reaksi muncul oleh pihak-pihak yang merada terdiskreditkan oleh keadaan tersebut. Konflik pun tak dapat terhindarkan. Selain itu terdapat pula konflik Darfur. Alasan atau akar masalahnya adalah, daerah wilaya barat Sudan ini merasa termarginalkan oleh pemerintah pusat, dalam beberapa dimensi kehidupan mereka seperti ekonomi, politik dan kekuasaan. Konflik Darfur pun pecah.

Upaya dunia internasional untuk menyelesaikan konflik pun segera digelar. PBB sebagai organisasi tertinggi bangsa-bangsa merasa harus menyelesaikan persoalan yang terjadi di Sudan. Langkah-langkah yang dibuat PBB adalah dengan mengirim pasukan perdamaian, UNMIS serta menghasilkan beberapa resolusi sebagai dasar hukum menyelesaikan konflik tersebut. Selain PBB, Uni Afrika pun telah berusaha melakukan penyelesaian konflik di Sudan dengan membentuk AMIS. Upaya-upaya ini selalu gagal dan sangat sulit dalam menyelesaikan konflik di Sudan.

Selain PBB dan Uni Afrika yang berusaha menyelesaikan konflik di Sudan, terdapat pula instrument PBB seperti *International Criminal Court* (ICC). ICC masuk sebagai sebuah instrument oleh karena konflik di Sudan disinyalir terdapat kejahatan-kejahatan perang serta kekerasan kemanusiaan seperti genosida, pembantaian, pemerkosaan. Kejahatan ini tentunya dilakukan oleh pemerintah Sudan secara khusus

oleh Presiden Sudan, Omar al-Bashir. Upaya proses hukum yang dilakukan juga tidak jarang menemukan kesulitan yang berimbas pada kegagalan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan dalam proses penyelesaian konflik di Sudan:

- 1) Kegagalan disebabkan oleh kerumitan yang diciptakan oleh aktor-aktor yang mempunyai kepentingan di Sudan. aktor-aktor tersebut antarlain, Amerika Serikat, Cina, Kanada yang mempunyai kepentingan ekonomi dan politik di Sudan.
- 2) Kegagalan penyelesaian konflik juga disebabkan oleh lemahnya motivasi pihak-pihak yang berseteru seperti pemerintah Sudan, pemberontak, militer Sudan, serta milisi Janjaweed.

Dunia internasional senantiasa selalu berusaha menyelesaikan konflik dan ketegangan yang terjadi di Sudan. Hal ini adalah agar terciptanya perdamaian di Sudan yang juga ikut serta menciptakan perdamaian dunia. Kegagalan penyelesaian konflik ini bukan menjadikan alasan untuk membiarkan Sudan terus dalam situasi seperti ini, sehingga selain aktor internasional dan pihak-pihak berwenang untuk menyelesaikan konflik di Sudan, diharapkan partisipasi semua pihak untuk dapat mendukung partisipasi penyelesaian konflik di Sudan.